

**PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI OLEH NOTARIS
PEMBUAT AKTA KOPERASI (NPAK)
MELALUI LAYANAN SISTEM ONLINE**

Tesis

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar akademik
Magister Kenotariatan*



OLEH:

RANDY KURNIAWAN

1720123032

Dosen Pembimbing :
Dr. Rembrant, S.H., M.Pd
Dr. Wetria Fauzi., S.H., M.H

**PROGRAM STUDI : MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2020**

PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI OLEH NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI (NPAK) MELALUI LAYANAN SISTEM ONLINE

Randy Kurniawan, 1720123032, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, 102 Halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Beralihannya sistem pengesahan badan hukum koperasi yang awalnya dikelola oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) melimpahkan pengesahan badan hukum koperasi kepada sistem Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), berdampak terhadap kepastian hukum Notaris, dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku Notaris pembuat akta koperasi (NPAK). Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana proses pengesahan badan hukum koperasi oleh Notaris pembuat akta koperasi melalui layanan sistem online? Dan akibat hukum tidak didaftarkannya akta koperasi oleh Notaris pembuat akta koperasi pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Dengan menggunakan pendekatan yuridis Normatif. Proses pengesahan badan hukum Koperasi melalui SISMINBHKOP ke sistem SABH oleh Notaris mengalami kendala pada praktek dilapangannya, dimana Koperasi yang terdaftar dalam sistem SISMINBHKOP diminta untuk dirubah kepada sistem SABH dalam hal pengajuan pinjaman dana oleh Koperasi kepada pihak ketiga yaitu perbankan. Aturan hukum mengenai proses Pengesahan Badan Hukum koperasi dalam pembuatan, perubahan dan pengesahannya, oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi hendaknya disusun kembali, sehingga lebih memudahkan Notaris dalam melaksanakan tugas selaku pejabat umum pembuat Koperasi. Sosialisasi kepada masyarakat juga diharapkan, khususnya kepada para pelaku Koperasi terhadap masih berlakunya Akta Koperasi yang disahkan oleh Kementerian Koperasi melalui sistem SISMINBHKOP, tanpa di lakukan pengesahan kembali pada sistem SABH dibawah Kemenkumham, diharapkan dapat membuka wawasan para pelaku koperasi dan pihak ketiga lainnya yang berhubungan dengan seluk beluk koperasi seperti perbankan sebagai penyedia dana dalam melaksanakan kegiatan simpan pinjam koperasi.

Kata kunci : Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi (SISMINBHKOP), Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK).

COOPERATIVE LEGAL ENTITY RATIFICATION BY NOTARY OF COOPERATIVE DEED MAKER (NPAK) THROUGH ONLINE SYSTEM SERVICE

Randy Kurniawan, 1720123032, Master of Notary Program, Faculty of Law, Andalas University, 102 pages, 2020

ABSTRACT

The switch of a cooperative legal entity ratification system which is at first managed by the Ministry of Cooperatives and SMEs (UKM) delegates the cooperative legal entity ratification to the Ministry of Law and Human Rights system, then it impacts on the legal certainty of a notary in carrying out their duties and positions as a notary of cooperative deed maker (NPAK). The problems raised are how the process of cooperative legal entity ratification by the notary of cooperative deed maker through an online system service and the law consequence of cooperative deed which is unregistered by the notary of cooperative deed maker in the legal entity administration system (SABH). By using the juridical-normative approach, the process of cooperative legal entity ratification through the cooperative legal entity administration system (SISMINBHKOP) to the legal entity administration system (SABH) by the Notary has obtained obstacles in practice in its field, where the registered cooperatives in the SISMINBHKOP system are requested to switch to the SABH system in the case of applying for a loan of funds by the cooperative to the third party, namely banking. The legal rules regarding the ratification process of a cooperative legal entity in the making, amendment and ratification by the Notary of the Cooperative Deed maker should be re-arranged, so it makes it easier for the Notary to carry out their duties as the general official of the cooperative deed maker. The socialization to the community is also expected, especially to the cooperative actors towards the validity of the Cooperative Deed which is legalized by the Ministry of Cooperatives through the SISMINBHKOP system without re-ratification on the SABH system under the Ministry of Law and Human Rights, to open up the insight of the cooperative actors and other third parties related to ins and outs of cooperatives such as banking as providers of funds in carrying out cooperative savings and loan activities.

Keywords: Cooperative Legal Entity Administration System (SISMINBHKOP), Legal Entity Administration System (SABH), Notary of Cooperative Deed Maker (NPAK)